

Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Melalui Sektor Membatik di Kampung Penawangan

The Efforts of the Village Government in Empowering Retired Indonesian Migrant Workers through the Batik Sector in Kampung Penawangan

Oleh: Yasir Marzuqi*, Umi Hawa Habibah**

e-mail: yasir@ppkn.uad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya peluang kerja di dalam negeri, memaksa sebagian masyarakat di Kampung Penawangan, Kabupaten Wonosobo untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, permasalahan baru muncul ketika para PMI kembali ke daerah asal mereka tanpa kemampuan untuk mengelola perekonomian, sehingga hasil yang diperoleh dari pekerjaan di luar negeri untuk membuka usaha di daerah asal habis karena mengalami kerugian. Penting untuk dicatat bahwa batik di Kabupaten Wonosobo memiliki potensi besar, mengingat Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Oleh karena itu, peran pemerintah sangatlah penting dalam melakukan pemberdayaan PMI purna agar dapat bertahan dan mengembangkan ekonomi di daerah asal mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan PMI purna melalui sektor batik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur dengan subjek penelitian yaitu PMI purna dan pemerintah desa Kampung Penawangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa melakukan pemberdayaan terhadap PMI purna dengan meningkatkan kemampuan mereka, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, melalui pembentukan kelompok batik yang didukung oleh pemerintah melalui program pelatihan, pendanaan, dan fasilitas. Selain itu, peningkatan kemampuan juga dilakukan melalui pemberian keterampilan khusus dalam bidang batik bagi para PMI purna. Dampak positif yang dihasilkan antara lain adalah meningkatnya eksistensi pakaian tradisional batik di masyarakat, hubungan sosial yang lebih erat antara PMI purna dan masyarakat non-PMI yang berprofesi sebagai pembatik, serta adanya peningkatan pendapatan melalui sektor batik.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Pekerja Migran Indonesia, Membatik

ABSTRACT

This research is motivated by the limited job opportunities domestically, which forces some of the community in Kampung Penawangan, Wonosobo Regency, to work abroad as Indonesian Migrant Workers (IMWs). However, new issues arise when these IMWs return to their hometown without the capability to manage the economy, leading to the depletion of earnings from overseas employment for starting businesses in their home area due to experiencing losses. It is noteworthy that batik in Wonosobo Regency holds significant potential, considering it is one of Indonesia's popular tourist destinations. Therefore, the government's role is crucial in empowering returning IMWs to sustain and develop the economy in their hometowns. The aim of this study is to understand the role of the village government in empowering returning IMWs through the batik sector. The research employs a

Yasir Marzuqi¹, Umi Hawa Habibah²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Ahmad Dahlan

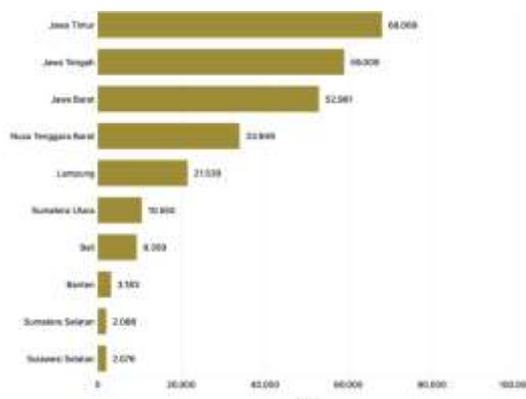
qualitative approach with a case study design. Data collection is conducted through observation, documentation, and semi-structured interviews with the research subjects, namely, returning IMWs and the village government of Kampung Penawangan. The findings reveal that the village government empowers returning IMWs by enhancing their skills and knowledge through the establishment of batik groups supported by training programs, funding, and facilities. Furthermore, skill enhancement is also provided through specialized training in the field of batik for returning IMWs. Positive outcomes include the increased presence of traditional batik clothing in society, stronger social bonds between returning IMWs and non-IMW community members working as batik artisans, and a rise in income through the batik sector.

Keyword : Government Role, Empowerment, Indonesian Migrant Workers, Batik Making.

PENDAHULUAN

Keterbatasan peluang kerja beserta ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja berdampak besar pada kondisi sosial ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini mendorong sebagian masyarakat untuk mencari solusi dengan berbagai inisiatif, termasuk perpindahan ke daerah lain bahkan hingga ke luar negeri, yang seringkali dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut data yang diperoleh pada tahun 2023, jumlah total PMI yang bekerja di luar negeri mencapai 274.965 orang, dengan distribusi yang berbeda-beda di setiap wilayah (Databoks.katadata.co.id, 2024):

Gambar 1. 10 Provinsi Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak (2023)



Sumber: Databoks.katadata.co.id
Data tersebut menggambarkan bahwa

banyak pekerja migran Indonesia memilih untuk mencari peruntungan di luar negeri demi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Selain itu, kota dengan jumlah pekerja migran terbanyak yang menempati urutan kedua adalah kota Jawa Tengah. Salah satu kontributor utama pekerja migran dari Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonosobo, dengan rincian data yang terperinci seperti yang disajikan oleh BPS Kabupaten Wonosobo (2020):

Gambar 2. Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Kerja Menurut Negara Tujuan di Kabupaten Wonosobo, 2020

Negara Tujuan	Pencari Kerja	Penempatan
(1)	(2)	(3)
1. Brunei Darussalam	5	5
2. Hongkong	146	146
3. Korea Selatan	10	10
4. Malaysia	17	17
5. Saudi Arabia	2	2
6. Taiwan	172	172
7. Jepang	2	2
8. Singapura	46	46
9. Bahrain	-	-
10. Bahamas	-	-
11. Oman	-	-
12. Papua Nugini	-	-
13. Amerika Serikat	-	-
14. Polandia	-	-
15. Kuwait	-	-
16. Qatar	-	-
Jumlah	400	400

Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo, 2020

Banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri didasari oleh berbagai alasan yang dianggap lebih menguntungkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rizqi (2018: 1161), terdapat sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh

oleh para pekerja migran Indonesia ketika bekerja di luar negeri, seperti memperoleh pekerjaan dengan lebih mudah, penghasilan yang lebih besar dibandingkan di dalam negeri, kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan, dan peluang untuk mengembangkan keterampilan. Selain memberikan dampak positif bagi pekerja migran itu sendiri, program ini juga dianggap sebagai salah satu alternatif strategis oleh pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, serta mendapatkan devisa negara (Rizqi, 2018: 1162). Meskipun terdapat sejumlah dampak positif yang signifikan, ada pertimbangan-pertimbangan yang membuat sebagian pekerja migran memilih untuk kembali ke daerah asal mereka. Salah satu pertimbangan utama adalah faktor keluarga. Data mengenai pekerja migran Indonesia menunjukkan bahwa keputusan untuk bekerja di luar negeri mengakibatkan berkurangnya peran anggota keluarga di dalam rumah tangga. Biasanya, peran ayah sebagai kepala rumah tangga dan ibu sebagai pengurus rumah tangga menjadi terombang-ambing. Situasi ini secara tidak langsung berdampak pada kondisi keluarga, yang seringkali mengarah pada peran ganda dalam keluarga dan dapat mengganggu stabilitas rumah tangga (Anggraini, 2023: 318). Perubahan-perubahan ini menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi para pekerja migran Indonesia untuk segera mengumpulkan dana yang mereka peroleh dari luar negeri dan kembali ke Indonesia, dengan upaya meningkatkan kualitas ekonomi di daerah asal mereka.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013, Bab 1, Pasal 1, menjelaskan bahwa ketahanan keluarga adalah keadaan di mana sebuah keluarga memiliki keteguhan dan keuletan serta memiliki kemampuan materi fisik untuk hidup mandiri serta mengembangkan diri dan keluarganya dengan harmonis, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan

secara lahiriah dan batiniah. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga menjelaskan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar menciptakan rasa aman, ketenangan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik, guna mewujudkan kesejahteraan lahiriah dan kebahagiaan batiniah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa ketahanan keluarga pada dasarnya merupakan upaya untuk menciptakan sistem yang fungsional di antara anggota keluarga, sehingga keluarga dapat bertahan dan pulih dari berbagai tantangan kehidupan.

Pada tahun 2021, terdapat 2.373 pasangan yang mengalami perceraian di Wonosobo, yang mengindikasikan bahwa masalah terkait dengan ketahanan keluarga merupakan persoalan yang memerlukan solusi yang mendalam (Radarsemarang.id, 2023). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Junaedi (2018: 86), jumlah pencari kerja dan tenaga kerja terutama didominasi oleh kaum perempuan, terutama setelah menikah. Dampak dari situasi ini secara internal memengaruhi kehidupan keluarga, khususnya hubungan antara suami istri, anak-anak yang merasa terasing, terjadinya miskomunikasi, terputusnya ikatan biologis antara pasangan, munculnya perselingkuhan, serta pertengkaran yang tak kunjung usai, yang akhirnya berujung pada perceraian (Junaedi, 2018: 86). Ini mengindikasikan bahwa pekerjaan bagi kaum perempuan, selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, juga seringkali berdampak pada harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak pekerja migran Indonesia berupaya mengumpulkan modal dengan bekerja di luar negeri, dengan harapan dapat kembali ke daerah asal dan membangun usaha bersama, serta menyatukan kembali keluarga mereka dengan modal yang terkumpul.

Secara umum, studi yang dilakukan oleh Pratomo (2018) menegaskan bahwa

Yasir Marzuqi¹, Umi Hawa Habibah²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Ahmad Dahlan

tenaga migran yang bekerja di luar negeri memainkan peran penting dalam upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia. Namun, kurangnya perhatian terhadap penanganan kemiskinan ketika para pekerja migran pulang ke daerah asalnya menjadi kekhawatiran. Sejumlah negara, khususnya di kawasan ASEAN, mulai menyadari pentingnya fenomena kembalinya para pekerja migran dan mulai menerapkan kebijakan untuk mengekstraksi keterampilan, pengetahuan, dan tabungan mereka guna memperkuat upaya pengentasan kemiskinan yang lebih luas (Pratomo, 2018: 206). Situasi ini menunjukkan bahwa kembalinya para pekerja migran tidak selalu berarti terbebas dari kemiskinan, karena sebagian besar dana yang mereka peroleh seringkali digunakan untuk kebutuhan konsumtif pribadi.

Oleh karena itu, pentingnya pembentukan jiwa wirausaha atau wadah bagi para pekerja migran yang kembali ke Indonesia agar dapat memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Chan (2016: 3) dalam penelitiannya, sebanyak 11 provinsi di seluruh Indonesia ditargetkan untuk "memberdayakan" para pekerja migran kembali agar dapat menjadi pengusaha lokal. Hal ini dilakukan karena dapat memberikan para pekerja migran kembali dan keluarga mereka sumber pendapatan tetap, sehingga tidak perlu lagi bermigrasi. Kampung Penawangan, Kelurahan Tawangsari Wonosobo, dimana masyarakat dan pemerintah daerah berupaya untuk menciptakan peluang pendapatan untuk para pekerja migran kembali dengan fokus mengembangkan potensi daerah yaitu membatik. Profesi membatik menjadi salah satu pilihan selain sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian, batik juga warisan budaya Indonesia yang telah ditetapkan sebagai *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity* pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO (Aprilia Ningrum & Nufus, 2021: 2). Oleh sebab itu, kelangsungan batik

menjadi hal penting bagi Indonesia dan dimasa mendatang kelangsungan batik tergantung pada apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosiyanti & Gustaman (2020: 988) mengenai pemberdayaan perempuan di Desa Migran Produktif Purworejo, yang dilakukan oleh perempuan purna migran melalui berbagai program, ternyata belum sepenuhnya mencapai tingkat kemandirian yang diharapkan, karena pencapaian masih terbatas pada tingkat partisipasi belaka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sasongko (2023: 91) dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung, upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemberdayaan purna Pekerja Migran Indonesia di desa Pojok Ngantru Tulungagung, seperti pelatihan, pemberian modal, distribusi, dan pemasaran. Hasilnya, para purna Pekerja Migran Indonesia mendapatkan bantuan dan mampu mengembangkan usaha mereka. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartanto, dkk., (2022: 49) menunjukkan bahwa pemberdayaan purna PMI oleh UPT-BP2MI DIY memiliki dampak positif terhadap peningkatan ketahanan ekonomi keluarga purna PMI. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait keuangan, kewirausahaan, serta kerjasama kelompok, sehingga kegiatan wirausaha yang dilakukan mampu menyerap tenaga kerja di sekitarnya

Hasil penelitian tersebut menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam membangun ketahanan ekonomi bagi para purna pekerja migran Indonesia. Dengan demikian, ketika mereka kembali ke daerah asal, para purna pekerja migran Indonesia dapat bertahan, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan turut berkontribusi dalam memajukan perekonomian daerah. Pada

Yasir Marzuqi¹, Umi Hawa Habibah²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Ahmad Dahlan

penelitian ini, fokus akan diberikan pada upaya pemerintah desa di Kampung Penawangan, Kabupaten Wonosobo, dalam memberdayakan para purna pekerja migran Indonesia melalui sektor membatik. Batik, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, tidak hanya memegang peranan penting dalam melestarikan budaya, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian jika dikelola dengan baik. Hal ini menjadi relevan mengingat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo sebagai destinasi wisata yang diminati, dengan mencatatkan kunjungan sebanyak 8.829.656 orang pada tahun 2020, terdiri dari 53.399 wisatawan mancanegara dan 8.776.257 wisatawan domestik (Disporapar Jateng, 2022). Potensi ini menjadi peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan perekonomian melalui pemberdayaan para purna pekerja migran Indonesia di sektor batik, sehingga mampu bersaing dalam perekonomian domestik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan penelitian kualitatif atau biasa disebut dengan penelitian *naturalistic* merupakan penelitian yang berlandaskan *postpositivisme* (pradigma yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang *holistic* atau utuh, kompleks, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif). Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015: 19). Sedangkan desain studi kasus yang mana desain studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang difokuskan pada analisis kasus individual atau kelompok kecil dari individu, organisasi, dan fenomena tertentu.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami situasi dan masalah kompleks serta mendapatkan wawasan mendalam mengenai perilaku, proses, dan pengalaman yang terkait dengan kasus tersebut (De Vaus, 2001). Subjek pada penelitian ini adalah para pekerja migran Indonesia purna dan pemerintah desa di Kampung Penawangan, Kabupaten Wonosobo.

Teknik pengumpulan data menggunakan *interview* atau wawancara semi terstruktur yang mana peneliti menggunakan pedoman wawancara berisi garis besar pernyataan yang ditanyakan dalam proses wawancara. Wawancara dalam penelitian berupaya menjawab rumusan masalah penelitian yaitu informasi berkaitan dengan bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna melalui sektor membatik. Selanjutnya untuk memperdalam data penelitian, peneliti melakukan observasi, pada pengamatan, peneliti merekam atau mencatat dengan cara terstruktur maupun semiterstruktur serta peneliti dapat terlibat secara langsung pada aktifitas masyarakat berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam pemberdayaan purna pekerja migran Indonesia dalam hal membatik (Creswell, 2016). Pada teknik yang terakhir peneliti menggunakan dokumentasi, yang mana dokumentasi sangat membantu dalam proses pengumpulan data sebagai pendukung dan penjelas tentang data yang digali melalui wawancara dan observasi (Yin, 2011). Dokumentasi dapat berupa *public* (koran, makalah dan sejenisnya) ataupun berkas lain yang mendukung dari apa yang diteliti oleh peneliti (Creswell, 2016). Pada teknik pengumpulan data berupa dokumentasi pada penelitian ini dapat berupa foto serta dokumen-dokumen pendukung seperti rancangan program pemberdayaan pekerja

migran Indonesia purna, bukti terlaksananya program, bukti produk, dan beberapa lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna di Kampung Penawangan

PMI purna menurut Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 17 Tahun 2015 tentang pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan keluarganya adalah tenaga kerja Indonesia purna yang selanjutnya disebut PMI purna adalah setiap PMI yang telah kembali ke Indonesia baik karena telah berakhir perjanjian kerjanya ataupun karena sebab lain termasuk PMI bermasalah (Indrayanik, dkk., 2023: 53). Secara umum para pekerja migran ketika kembali ke daerah asalnya memiliki kendala dalam hal pengembangan diri untuk mempertahankan perekonomiannya atau bahkan meningkatkan perekonomian di daerah asal. Tidak jarang para mantan TKI yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan paling tidak untuk mereka sendiri, terpaksa harus kembali melakukan migrasi ke luar negeri untuk bekerja. Hal tersebut dilakukan karena usaha ekonomi yang dilakukan pada pekerja migran Indonesia purna tidak dapat berkembang, yang pada akhirnya menyebabkan habisnya modal usaha yang dimiliki (Noveria, 2017:27). Pemerintah desa di Kampung Penawangan, berupaya untuk meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia purna agar tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan perekonomiannya di daerah asalnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pekerja migran Indonesia purna di Kampung Penawangan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya baik berupa pelatihan kepada para pekerja migran Indonesia purna agar dapat

berdaya dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Seperti yang diungkapkan salah satu responden “selama ini kami terus mengupayakan adanya pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti oleh warga kami, karena memang harapan kami warga harus pulang gk boleh nganggur harus bisa berdaya” (K, 14 Juni 2023). Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan berupa bantuan dan fasilitas untuk membantu para pekerja migran dalam membangun usaha. Pada wawancara lainnya beberapa pekerja migran Indonesia purna menjelaskan bahwa ada beberapa bantuan dari pemerintah yang diterima seperti bantuan alat-alat produksi batik, mesin jahit, printer, genset, dan lemari untuk kelompok batik. Adanya bantuan-bantuan tersebut memungkinkan para pekerja migran Indonesia purna dapat secara mandiri dan mengelola usaha mereka dan berusaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

Keseriusan pemerintah dalam pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna agar dapat meningkatkan perekonomian mereka dimulai dari kepulauan PMI purna sampai di Kampung Penawangan. Para PMI purna langsung didata oleh pemerintah desa sehingga pemerintah desa dapat menyesuaikan total SDM tersebut dengan program pemberdayaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu responden “ya pas pulang langsung didata, ditanyain mau gabung deprogram pemerintah ga? Jadi ada untuk yang pekerja migran ada juga untuk khusus keluarga migran, jadi mereka akan dapat pelatihan semua” (B, 27 Mei 2023). Pernyataan tersebut memberikan pemahaman bahwa peran pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi PMI purna tercermin dalam perhatian mereka terhadap kesejahteraan keluarga migran. Pemerintah menyadari bahwa keluarga para pekerja migran juga membutuhkan dukungan dan bantuan dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, pemerintah berusaha memberikan bantuan dan pelatihan

Yasir Marzuqi¹, Umi Hawa Habibah²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Ahmad Dahlan

kepada keluarga PMI purna agar dapat bekerja sama dan mandiri serta berdaya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari.

Hingga kini, Kelompok Batik Abhirama Kampung Penawangan telah berhasil mengembangkan produksi batik secara aktif dan melakukan pemasaran produk-produknya. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh anggota kelompok dalam memanfaatkan potensi dan keterampilan dalam seni batik. Data dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti terkait perjalanan kelompok ini menjadi sumber informasi penting dalam memahami perkembangan dan kontribusi Kelompok Batik Kampung Penawangan dalam sektor ekonomi lokal dan pelestarian seni budaya tradisional.



1	1980	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan
2	1985	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan
3	1990	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan
4	1995	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan
5	2000	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan
6	2005	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan
7	2010	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan
8	2015	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan
9	2020	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan
10	2024	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan	Sejarah pembentukan di Desa Penawangan

Gambar 1. Sejarah Kelompok Batik Kampung Penawangan

Namun, perlu dipahami bahwa berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh peneliti perjalanan program kelompok batik di Kampung Penawangan tidaklah singkat dan melibatkan berbagai inovasi dan upaya dalam meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Sebelum industri produksi batik didirikan di Kampung Penawangan, Kabupaten Wonosobo, baik masyarakat maupun pemerintah telah melakukan serangkaian langkah dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

masyarakat setempat. Pada tanggal 20 Oktober 2014, Kelompok Buruh Migran Lingkungan Penawangan ikut serta dalam pelatihan hasil pertanian yang diadakan di Balai Kelurahan Tawang Sari oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan tersebut diikuti oleh 20 orang anggota kelompok buruh migran Penawangan. Namun, inisiatif tersebut tidak berhenti di situ saja. Pada tanggal 11 November 2015, diadakan pelatihan tata boga yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana di Desa Rejosari, meskipun hanya diikuti oleh dua orang. Selain itu, sebelum terbentuknya Kelompok Batik Kampung Penawangan, terdapat program pelatihan jamur tiram yang diadakan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran dan Pencari Kerja Indonesia (BP2TKI) yang diikuti oleh lima orang.

Melalui berbagai program dan inisiatif tersebut, perlahan-lahan lahir sebuah program pelatihan batik yang menjadi titik tolak dalam pembentukan Kelompok Batik Kampung Penawangan yang hingga kini masih berdiri teguh. Dengan berjalannya program-program ini, Kelompok Batik Abhirama Kampung Penawangan berhasil tumbuh dan berkembang sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam seni batik.



Gambar 2. Batik Produksi PMI Purna Kampung Penawangan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pada dasarnya pemerintah desa di Kampung Penawangan, Kabupaten Wonosobo sudah

melakukan upaya pemberdayaan para pekerja migran Indonesia purna untuk dapat bertahan dan meningkatkan perekonomiannya di daerah asal. Pemberdayaan yang dilakukan selaras dengan apa yang diutarakan oleh Ndraha (dalam Alaina, 2016: 6) bahwa pemerintah melakukan pemberdayaan dengan meningkatkan *ability* serta *capability* para pekerja migran Indonesia purna tersebut sehingga dapat bersaing, memiliki pemikiran kritis dalam menghadapi masalah dan keterampilan yang memenuhi standar untuk bersaing di dunia produksi terutama batik. Perhatian pemerintah terhadap peningkatan *intellectual ability* bagi para PMI purna dilakukan dengan membentuk kelompok batik para PMI purna sehingga dapat secara tidak langsung meningkatkan kemampuan dalam berpikir, menalar dan memecahkan masalah dengan berorganisasi dalam kelompok batik itu sendiri. Pada bagian *physical ability* berdasarkan data yang diperoleh pemerintah fokus pada peningkatan keterampilan para PMI purna, dimana pemerintah memberikan berbagai pelatihan keterampilan dengan tujuan para PMI purna dapat memanfaatkan potensi dan keahlian yang dimiliki terutama dalam hal membatik (Widyaswara, dkk., 2022: 257). Pada peran pemberdayaan selanjutnya pemerintah juga melakukan peningkatan dalam hal *capability* yang mana para PMI dalam menunjukkan kemampuan khusus untuk dapat bersaing di dunia industri batik dan mempertahankan dan meningkatkan perekonomiannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan bertahannya para PMI purna dan terlaksananya produksi batik dengan berkelanjutan.

Dampak Positif Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan PMI Purna Melalui Sektor Membatik

Menekuni profesi sebagai pembatik bagi pekerja migran Indonesia purna tentu bukanlah hal yang muda. Ada banyak hal yang perlu dipelajari baik mulai dari pengetahuan membatik, keterampilan dalam membatik dan yang terpenting adalah

beradaptasi dengan pekerjaan membatik itu sendiri. Pada konteks ini, adaptasi merujuk pada proses penyesuaian dan perubahan yang dilakukan oleh pekerja migran untuk kembali memulai kehidupan mereka sebagai pembatik di kampung halaman. Para pekerja migran Indonesia purna yang bergabung dan menekuni dunia membatik memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial di masyarakat non pekerja migran yang berprofesi sebagai pembatik juga. Tingkat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan justru terjalin dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang menjelaskan bahwa “hubungan saling baik, saling *support* tidak pernah ada kendala sampai hari ini, karena justru ada yang anggota wanita tani ya isinya anggota pembatik juga, jadi disini semua dilakukan sama-sama dan saling dukung” (S, 26 Mei 2023). Selain itu dari PMI purna yang bekerja sebagai pembatik juga menyampaikan bahwa “kita saling bantu, kadang saya aja minta bantu buat dijual batik saya gitu, ada yang missal adek saya guru itu tak suruh nawar-nawarin batik saya. Ada juga dia jual roti buat lebaran ya kita saling ngelarisi jadi sama-sama gitu” (K, 26 Mei 2023). Hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa, adanya dampak sosial yang positif dari PMI purna yang bekerja sebagai pembatik dengan pekerja batik yang non PMI. Tingkat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan antara kedua kelompok ini terjalin dengan baik. Hal ini tercermin dari penjelasan Ketua Kelompok Batik di Kampung Penawangan yang menyatakan bahwa hubungan antara keduanya saling baik dan saling mendukung. Bahkan, anggota kelompok yang berprofesi sebagai wanita tani juga terlibat dalam kegiatan pembatikan, sehingga semua dilakukan bersama-sama dan saling mendukung.

Selain itu, dampak positif yang ditimbulkan dari pemberdayaan pekerja migran Indonesia purna melalui sektor batik ini adalah meningkatkan eksistensi batik di

Yasir Marzuqi¹, Umi Hawa Habibah²

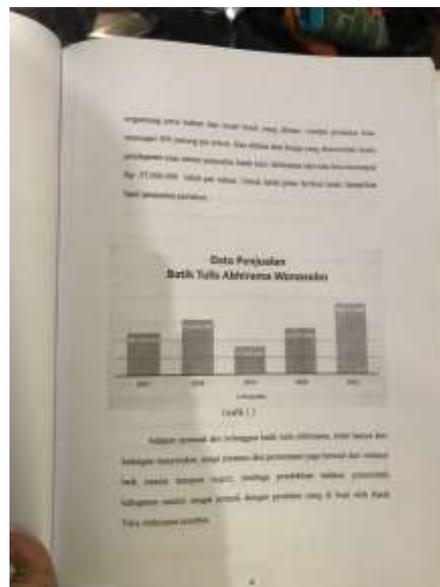
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Ahmad Dahlan

kalangan masyarakat. Batik di Kampung Penawangan yang merupakan salah satu kampung yang berada di Kabupaten Wonosobo seperti diketahui bersama bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu tempat wisata *hits* di Indonesia. Adanya produksi batik menjadi potensi bisnis dan penguatan eksistensi pakaian tradisional di wilayah tersebut. Selain itu, para PMI pun dengan adanya sektor membatik menyadarkan mereka bahwa membatik merupakan keterampilan yang diturunkan secara turun temurun. Kehidupan mereka menjadi lebih terikat dengan warisan budaya, kreativitas, dan keberlanjutan seni tradisional ini. Sebagai anggota komunitas pembatik menyadarkan mereka untuk menjalani kehidupan dalam lingkungan yang masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai khas batik tradisional daerah setempat.

Hal positif yang terakhir tentu adalah dampak ekonomi yang dirasakan oleh PMI purna di Kampung Penawangan, Kabupaten Wonosobo. Adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui sektor batik memberikan dampak positif bagi para PMI purna di Kampung Penawangan. Salah satu aparat desa di Kampung Penawangan menyampaikan bahwa para PMI purna yang sudah bergerak dibidang membatik sudah mendapatkan pesanan tidak hanya dari Wonosobo tetapi juga luar daerah (K, 14 Juni 2023). Hal selaras juga disampaikan oleh S (26 Mei 2023) salah satu ketua kelompok batik di Kampung Penawangan yang menjelaskan bahwa untuk kehidupan sehari-hari pendapatan dari membatik sangat membantu dan memiliki semangat untuk terus mengembangkan batik kedepannya. Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh peneliti juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021 penjualan baik mencapai Rp, 86.277.00, yang mana penjualan tersebut cukup meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp, 54.950.00. Data tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan PMI purna dalam sektor membatik memiliki dampak positif

terhadap perekonomian local di daerah tersebut.



Gambar 3. Data Penjualan Batik Tulis Abhirama Wonosobo

Hal ini mengindikasikan bahwa keahlian PMI purna sebagai pembatik diakui dan dihargai oleh konsumen dari berbagai wilayah, yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan penjualan. Selain itu, kembalinya pekerja migran juga berdampak positif pada pengembangan industri batik, terlihat dari semangat dan antusiasme yang sama dari pekerja migran dalam mengikuti pelatihan membatik. Hal ini memberikan dorongan pada pertumbuhan industri batik di wilayah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kembalinya pekerja migran Indonesia dan memanfaatkan sekteof membatik memberikan dampak positif secara ekonomi, sosial dan budaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa, pemerintah desa di Kampung Penawangan, Kabupaten Wonosobo telah secara aktif melakukan pemberdayaan para pekerja migran Indonesia purna, dengan mengadakan pelatihan dan memberi bantuan berupa alat

Yasir Marzuqi¹, Umi Hawa Habibah²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Ahmad Dahlan

produksi serta fasilitas untuk usaha batik. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual (*intellectual ability*) dan fisik (*physical ability*) saja, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan khusus (*capability*) terutama dalam industri batik dengan pembentukan kelompok batik dan pelatihan keterampilan. Hasilnya terlihat dari kesuksesan kelompok batik Abhirama Kampung Penawangan dalam produksi dan pemasaran batik yang menandakan bahwa kolaborasi kuat antara pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal dan melestarikan budaya tradisional Indonesia. Selanjutnya Dampak positif dari peran pemerintah dalam pemberdayaan PMI purna melalui sektor membatik terlihat dalam tiga aspek utama. Pertama, terciptanya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang baik antara PMI purna dan masyarakat non-PMI pembatik, menciptakan atmosfer saling dukung dan kerjasama. Kedua, pemberdayaan ini memperkuat eksistensi budaya batik di masyarakat, meningkatkan kesadaran akan warisan budaya dan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, secara ekonomi, pemberdayaan ini memberikan dampak positif dengan meningkatkan pendapatan penjualan batik PMI purna, yang juga mendorong pengembangan industri batik secara keseluruhan, memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaina, L. 2016. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Penyelenggaraan TV Kabel di Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016. *JOM FISIP*. 4 (1). 1-15.
- Anggraini, E. 2023. Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*. 7 (1). 317-328.
- Anwar, R. P., Chan. C. 2016. Contrasting Return Migrant Enterpreneurship Experiences in Javanese Villages. *International Migration*. 54 (4). Doi: DOI:[10.1111/imig.12232](https://doi.org/10.1111/imig.12232)
- Aprianingrum, A. Y., Nufus, A. H. 2021. Batik Indonesia, Pelestarian Melalui Museum. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Prosiding Seminar Nasional Industri Keajinan dan Batik Membangun Industri Kerajinan dan Batik yang Tangguh di Masa Pandemi.
- BPS Kabupaten Wonosobo. 2020. Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Menurut Negara Tujuan di Kabupaten Wonosobo, 2020. Retrived April 4, 2024, from <https://wonosobokab.bps.go.id/statistic/able/2021/06/14/247/jumlah-pencari-kerja-dan-penempatan-menurut-negara-tujuan-di-kabupaten-wonosobo-2020.html>
- Databoks. 2024. *10 Provinsi Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak (2023)*. Retrived April 4, 2024, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/05/ini-daerah-asal-pekerja-migran-indonesia-pada-2023-jawa-timur-mendominasi>
- Hartanto, D., Hamid, E.S., Supraja, M. 2022. Peran UPT-BP2MI DIY dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Ketahanan Nasional*. 28 (1). 38-50.
- Indrayanik, C. S., Utama, Y. H. C., Mamuaya, C. L. 2023. Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga Mantan Pekerja Migran Melalui Paguyuban Keluarga Migran. *BERDAYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1 (2). 48-53.
- Junaedi, M. 2018. Fenomena Perceraian dan Perubahan Sosial: Studi Kasus di kabupaten Wonosobo. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. 4

Yasir Marzuqi¹, Umi Hawa Habibah²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Universitas Ahmad Dahlan

- (1). 83-104.
- Noveria, M. 2017. Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 12 (1). 25-38.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2014. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Nomor 06 Tahun 2013.
- Pratomo, D. S., Jayanthakumaran, K. 2018. Returned Migrants and Remittances Alleviating Poverty: Evidence From Malang, East Java. *Economics and Sociology*. 11 (1). 205-217.
- Rachmadi, S. N. 2020. *Draft Buku Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka 2020*. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Radarsemarang.id. 2023. Setahun Ada 2.373 Pasangan Bercerai di Wonosobo. Retrieved April 5, 2024, from <https://radarsemarang.jawapos.com/wonosobo/721405871/setahun-ada-2373-pasangan-bercerai-di-wonosobo>
- Rizqi, M. A. 2018. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi masyarakat untuk Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus Pada Masyarakat Gresik Utara). *Seminar Nasional dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Rosiyanti, A., Gustaman, F. A. 2020. Pemberdayaan Perempuan di Desa Migran Produktif (Desmigratif) Guna Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Perempuan Desa Purworejo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal. *Solidarity*. 9 (1). 978-989.
- Sasongko, A. 2023. Kewirausahaan Sosial Guna Mewujudkan Pemberdayaan Perempuan Purna Kerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Wanita Sumber Rejeki Pojok Ngantru Tulungagung). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. 2 (1). 74-92.
- UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Widyaswara, P., Murdyastuti, A., Negoro, A. H. S. 2022. Peran Pemerintah Desa dalam Upaya Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Melalui Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) Desa Dukudempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. *Electronical Journal of Social and Political Sciences*. 9 (3). 254-263.